



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

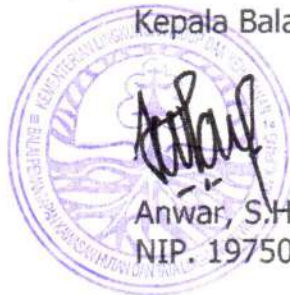
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai evaluasi terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV sebagai penyelenggara program pemerintah di bidang kehutanan khususnya bidang Keplanologian dan Tata Lingkungan yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Berakhirnya pelaksanaan DIPA kegiatan tahun 2023 berarti BPKHTL Wilayah XIV telah menyelesaikan kegiatannya berdasarkan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Tahun 2020 - 2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 – 2024, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan dalam upaya memenuhi visi dan misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, Januari 2024

Kepala Balai,



Anwar, S.Hut, M.Si
NIP. 19750626 200212 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
1.3. Sumber Daya Manusia	5
1.4. Permasalahan yang sedang dihadapi	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024	7
2.2. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023	11
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.....	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
A. IKK 1 <i>Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL</i>	19
B. IKK 2 <i>Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL</i>	23
C. IKK 2 <i>Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL</i>	26
D. IKK 3 <i>Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga</i>	30
E. IKK 4 <i>Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH</i>	33
F. IKK 5 <i>Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH</i>	37
G. IKK 6 <i>Indikator Kinerja Kegiatan 8 (Nilai SAKIP Ditjen PKTL)</i>	40
H. IKK 7 <i>Nilai Maturitas SPIP Ditjen PKTL</i>	42
3.2. Realisasi Anggaran	44
BAB IV. PENUTUP	47
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

1. Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Kerja BPKH Wilayah XIV Kupang	9
2. Rencana Kerja BPKHTL Wilayah XIV Tahun 2023	11
3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023	14
4. Perjanjian Kinerja 2023 (Perubahan II) BPKHTL Wilayah XIV Kupang	16
5. Capaian IKK BPKHTL Wilayah XIV Kupang	18
6. Capaian Kinerja Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023	19
7. Perbandingan Capaian Kinerja Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	20
8. Perbandingan Capaian Kinerja Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023 terhadap Realisasi Nasional Tahun 2023	22
9. Capaian Kinerja Dukungan Pelaksanaan Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan Tahun 2023	23
10. Realisasi SK Biru TORA di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023	24
11. Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	25
12. Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA Tahun 2023 terhadap Renstra 2020-2024	25
13. Capaian Kinerja Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan Tahun 2023	26
14. Capaian Kinerja Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya	27
15. Perbandingan Capaian Kinerja Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan Tahun 2023 terhadap Realisasi Nasional Tahun 2023	29
16. Capaian Kinerja Penataan Batas Kawasan Hutan Tahun 2023	30
17. Perbandingan Capaian Kinerja Penataan Batas Kawasan Hutan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	31
18. Perbandingan Capaian Kinerja Penataan Batas Kawasan Hutan Tahun 2023 terhadap Realisasi Nasional Tahun 2023	31
19. Lokasi Penataan Batas Tahun 2023 lingkup Provinsi NTT	32

20. Capaian Kinerja Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan Tahun 2023	34
21. Perbandingan Capaian Kinerja Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	35
22. Perbandingan Capaian Kinerja Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan Tahun 2023 terhadap Realisasi Nasional Tahun 2023	35
23. Capaian Kinerja Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional Tahun 2023	38
24. Perbandingan Capaian Kinerja Pelaksanaan Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	38
25. Perbandingan Capaian Kinerja Pelaksanaan Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional Tahun 2023 terhadap Realisasi Nasional Tahun 2023	39
26. Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL Tahun 2023	42
27. Hasil Penilaian Maturitas SPIP BPKHTL Wilayah XIV Kupang Tahun 2023 pada Aplikasi SPIP-Maturitas	42
28. Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja	44
29. Realisasi Belanja Per Sumber Dana	44
30. Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan	45
31. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan Desember 2023	46

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah XIV Kupang	4
2. Peta wilayah kerja BPKHTL Wilayah XIV Kupang	5
3. Komposisi Pegawai BPKHTL Wilayah XIV Kupang sampai bulan Desember 2023	6
4. Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Penyusunan Dokumen KLHS	21
5. Bimtek Penggambaran dan Penyajian Peta Dokumen Lingkungan	28
6. Pengecekan Lapangan (Groundcheck)	37
7. Perkembangan Nilai Implementasi SAKIP Ditjen PKTL	42
8. Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPKHTL Wilayah XIV Kupang Tahun 2023 oleh Itjen Wilayah 2	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Teknis di bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan tata kelola kehutanan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Upaya untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan hidup yang berkelanjutan maka dilakukan inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta pelaksanaan perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai evaluasi terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV sebagai penyelenggara program pemerintah di bidang kehutanan khususnya bidang Keplanologian dan Tata Lingkungan yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022, BPKHTL Wilayah XIV Kupang memiliki tugas Melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data

dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas, BPKHTL Wilayah XIV Kupang juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
4. Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
5. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
6. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
7. Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
8. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
9. Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
10. Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
11. Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
12. Pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
13. Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah;

14. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

B. Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPKHTL Wilayah XIV Kupang dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi BPKHTL sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.
2. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.
3. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan

dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.

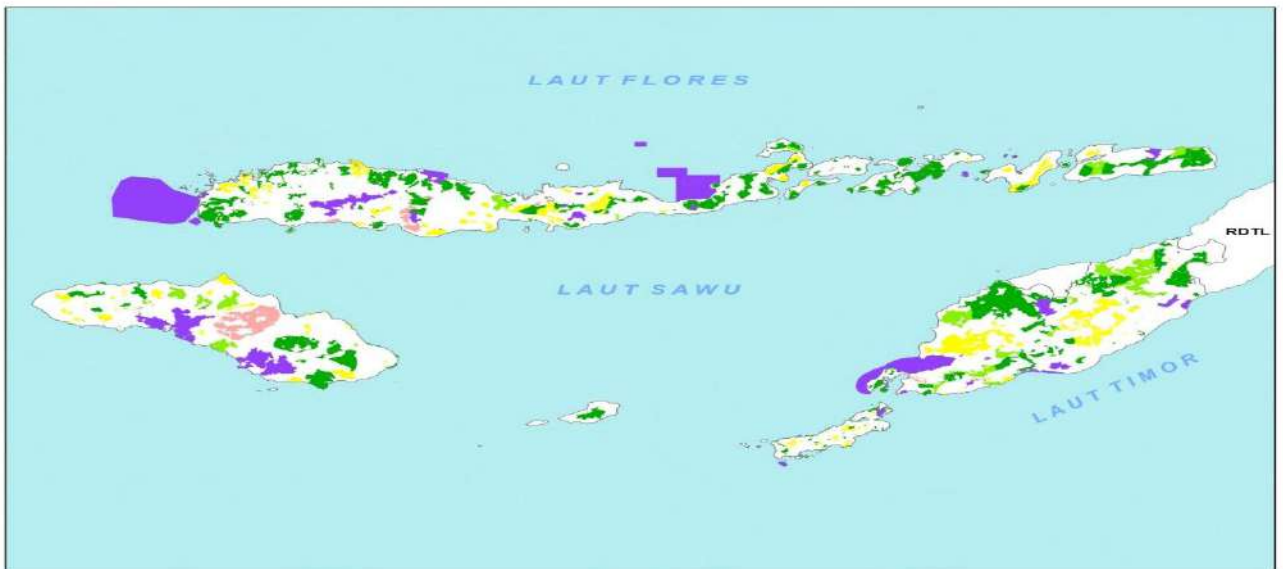
4. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah XIV Kupang

Secara garis besar kegiatan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi kerja berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Adapun wilayah kerja BPKHTL Wilayah XIV Kupang adalah seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti tergambar pada peta sebagai berikut :



Gambar 2. Peta wilayah kerja BPKHTL Wilayah XIV Kupang

1.3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia BPKHTL Wilayah XIV Kupang diharapkan merupakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten serta memiliki kriteria utama sumber daya manusia aparatur kehutanan yang memiliki integrasi moral, kepemimpinan, kemauan kerjasama dan profesional. Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan konseptual, analitis dan teknis dibidangnya secara menyeluruh dan mempunyai sikap yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga keputusan dan tindakannya selalu didasari dengan rasionalitas, logis dan dilandasi etika profesi yang kuat.

Pegawai BPKHTL Wilayah XIV Kupang sampai dengan 31 Desember 2023 berjumlah 55 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 41 orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 14 orang, dimana Pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 41 orang (74,54%) dan Pegawai

yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 14 orang (25,45%). ASN yang dimaksud terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana PNS berjumlah 32 orang dan PPPK berjumlah 9 orang. Dalam menjalankan roda organisasi, BPKHTL Wilayah XIV Kupang dibantu dengan 14 orang PPNP yang tersebar pada Subbagian Tata Usaha sebanyak 9 orang, Seksi PPKH sebanyak 2 orang, dan Seksi SDHTL sebanyak 3 orang.

Keadaan sumber daya manusia BPKHTL Wilayah XIV Kupang seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 3. Komposisi Pegawai BPKHTL Wilayah XIV Kupang sampai bulan Desember 2023

1.4. Permasalahan yang sedang dihadapi

Permasalahan yang umumnya dihadapi pada tahun 2023 adalah adanya penolakan dari masyarakat karena kurangnya pengetahuan tentang manfaat kawasan hutan dan situasi sosial budaya masyarakat di beberapa lokasi kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024

Sebagai salah satu pilar pendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menjabarkan Visi Misi Presiden, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) merumuskan perannya dengan upaya mencapai *"Pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional"*. Visi Ditjen PKTL mengacu pada visi KLHK, sehingga tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah XIV Kupang merupakan bagian pengembangan visi KLHK yaitu *"Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"*.

Pada pernyataan-pernyataan tersebut di atas, terdapat tiga kata kunci, yakni:

1. Pemantapan kawasan hutan, yang berarti: mempercepat pemantapan kawasan hutan melalui penetapan kawasan hutan sebagai kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumber daya hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Penataan lingkungan hidup, yang berarti: mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan;
3. Partisipatif dan keberlanjutan, yang berarti : pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTL bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan

taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dengan memperhatikan Misi Ditjen PKTL, maka Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang memiliki misi sebagai berikut :

1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan;
2. Melaksanakan Proses Pengukuhan Kawasan Hutan;
3. Menyediakan Data Dan Informasi Sumber Daya Hutan;
4. Mensinergikan Perencanaan Makro dan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan
5. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Mengembangkan dan Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Planologi Kehutanan;
7. Melaksanakan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Pemantapan Kawasan Hutan.

Dalam mewujudkan visi misi yang diemban maka disusun suatu dokumen perencanaan lima tahunan berupa Rencana Strategi BPKHTL Wilayah XIV Kupang yang dalam perjalanannya mengalami perubahan target sehingga diperlukan Revisi Renstra. Adapun matriks kinerja dan pendanaan BPKHTL wilayah XIV Kupang dalam kurun waktu 2020-2024 tersaji pada Tabel 1.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang maka dibutuhkan sumber dana yang diusulkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Kelembagaan Negara / RKAKL Tahun 2023. Terdapat 3 (tiga) kegiatan pembangunan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah XIV Kupang yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen dengan 6 (enam) *Output* kegiatan sebagai berikut :

1. Dokumen fasilitasi pencegahan dampak lingkungan;
2. Dukungan Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan (reguler);
3. Inventarisasi Hutan Nasional 3 Klaster;
4. Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional 1 Lokasi;
5. Layanan Umum 12 Bulan;

6. Layanan Perkantoran 12 Bulan.

Berdasarkan sasaran strategis KLHK dan sasaran program DPKTL, kegiatan BPKHTL Wilayah XXII selama Tahun 2020-2024 terdiri dari : (1) pencegahan dampak lingkungan; (2) pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan; (3) inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan; (4) rencana dan penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan (5) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen planologi kehutanan dan tata lingkungan. tabel 1 menunjukkan target kinerja BPKHTL Wilayah XIV Kupang selama tahun 2020-2024.

Tabel. 1 Target Kinerja BPKHTL Wilayah XIV Kupang Tahun 2020-2024

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan	Renstra 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pencegahan Dampak Lingkungan	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	Fasilitasi Kajian Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	-	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Fasilitasi Kajian Dampak Lingkungan bidang usaha dan kegiatan	-	-	-	1 Layanan	1 Layanan
		Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan Hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	Verifikasi Lapangan Kawasan Hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	-	-	-	1 Layanan	-
2	Pengukuhan dan Penatagunaan	Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan	Penataan batas Kawasan hutan (reguler)	-	2.253 Km	-	1.139 Km	-

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan	Renstra 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Kawasan Hutan	Hak-hak pihak ketiga						
		Dokumen Hasil Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Inventarisasi dan verifikasi Obyek Tora dalam kawasan hutan	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan
			Penataan batas kawasan untuk penyelesaian TORA	-	117 Km	-	-	-
			Dukungan pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
3	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah Kerja BPKH	Inventarisasi potensi sumber daya hutan	10 Klaster	4 Klaster	8 Klaster	6 Klaster	7 Klaster
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional, termasuk <i>groundcheck</i> (pengecekan lapangan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
4	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Nilai SAKIP PKTL	79 poin	80 poin	81 Poin	82 Poin	83 Poin
		Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan	Renstra 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Sumber : Renstra BPKHTL XIV Kupang Tahun 2020-2024

2.2. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

Pada tahun 2023, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang menyelenggarakan 3 (tiga) program yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen dengan 5 unit kegiatan yaitu Pencegahan Dampak Lingkungan, Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan (pemasangan tanda batas sepanjang 1.139 km), Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan sebanyak 3 klaster, Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional sebanyak 1 lokasi, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 12 bulan.

Berdasarkan rencana strategis dan tugas pokok Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang tersebut perlu disusun rencana kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi seluruh staf BPKHTL Wilayah XIV Kupang sehingga memperoleh capaian yang maksimal. Adapun target BPKHTL Wilayah XIV Kupang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Kerja BPKHTL Wilayah XIV Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan	Satuan	Target 2023
1	Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Dampak Lingkungan	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	Fasilitasi Kajian Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Layanan	1
			Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan Kegiatan di	Fasilitasi Kajian Dampak Lingkungan	Layanan	1

No	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan	Satuan	Target 2023
			dan Kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	wilayah kerja BPKHTL	bidang usaha dan kegiatan		
			Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan Hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	Verifikasi Lapangan Kawasan Hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen	1
2	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan Hak-hak pihak ketiga	Penataan batas Kawasan hutan	Km	1.139
		Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya dan termutakhirnya data dan informasi sumber daya hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inveentarisasi Hutan Nasional di wilayah Kerja BPKH	Enumerasi TSP/PSP	Klaster	4
				Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah	Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional, termasuk <i>groundcheck</i> (pengecekan lapangan)	Laporan	1
3	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokras	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Nilai SAKIP PKTL	Poin	82
				Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3
				Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1
				Layanan Umum	Layanan Dukungan Manajemen satker BPKHTL	Layanan	1

No	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan	Satuan	Target 2023
				Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	Layanan	1
					Operasional dan Pemeliharaan kantor	Layanan	1
				Layanan Sarana Internal	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Unit	26
					Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	Unit	37

Selain ketersediaan anggaran, beberapa target yang akan dicapai Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari para pejabat struktural, staf dan kelompok jabatan fungsional dalam upaya pencapaiannya serta dukungan kerjasama dari stakeholder lainnya seperti instansi Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten, UPT KLHK, serta peran serta masyarakat dalam mendukung seluruh kegiatan BPKHTL Wilayah XIV Kupang.

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKHTL Wilayah XIV Kupang telah merencanakan kegiatan dan target kegiatan Tahun 2023 sesuai anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.617.708.000,-. (delapan miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SPDIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP-DIPA-029.06.2.439661/2023 tanggal 30 November 2022.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, telah dilakukan revisi DIPA dengan kronologis sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat Sekditjen PKTL nomor : S.42/SET.2/PEHKT/KEU.0/1/2023 tentang Usulan RKA-KL ABT PNBP-PKH TA 2023 tanggal 18 Januari 2023, maka pada bulan Februari Tahun 2023 terdapat Anggaran Belanja Tambahan (ABT)

PNBP-PKH sebesar Rp.15.654.550.000,- sehingga total ABT PNBP-PKH BPKHTL Wilayah XIV Kupang menjadi Rp.24.272.258.000.

2. Pada Revisi ke-9, terjadi Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari blokir *Automatic Adjustment* (AA) pada pagu eksisting BPKHTL Wilayah XIV Kupang sebesar Rp.244.410.000,- yang ditarik ke Bagian Anggaran (BA) Bendahara Umum Negara (BUN) tanggal 17 Juli 2023 sehingga pagu BPKHTL Wilayah XIV Kupang menjadi Rp.24.027.848.000.
3. Pemotongan anggaran selanjutnya di Revisi-15 yaitu dana belanja pegawai (001) sebesar Rp. 117.558.000,- dialihkan ke belanja operasional (002) dan dana belanja pegawai (001) sebesar Rp. 754.606.000,- ditarik ke pusat, sehingga pada akhir Desember 2023 anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang sebesar Rp. 23.273.242.000,-

Tabel 3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023

Kode	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ OUTPUT	Volume / Satuan	Jumlah
029.06.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup		980,000,000
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan		980,000,000
5436.QAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]	2 Layanan	100,000,000
5436.QAH.002	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	50,000,000
051	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor		50,000,000
5436.QAH.003	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	50,000,000
051	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		50,000,000
5436.QMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	1 layanan	880,000,000
5436.QMA.002	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	1 dokumen	880,000,000
051	Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif		880,000,000
029.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		14,630,635,000
5433	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan		14,301,631,000
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan[Base Line]	2 Rekomendasi Kebijakan	14,301,631,000
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	75,000,000
053	Dukungan Pelaksanaan Inventarisasi verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan		75,000,000

Kode	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ OUTPUT	Volume / Satuan	Jumlah
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	14,226,631,000
051	Penataan batas kawasan hutan (reguler)		13,700,000,000
052	Dukungan Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan (reguler)		526,631,000
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan		329,004,000
5434.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	4 layanan	329,004,000
5434.BMA.002	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	3 layanan	221,662,000
051	Inventarisasi Hutan Nasional		221,662,000
5434.BMA.003	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan	107,342,000
051	Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional		107,342,000
029.06.WA	Program Dukungan Manajemen		7,662,607,000
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		7,662,607,000
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2 Layanan	6,401,957,000
5432.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	1,098,900,000
059	Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKHTL		1,098,900,000
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	5,303,057,000
001	Gaji dan Tunjangan		3,522,069,000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1,780,988,000
5432.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	63 Unit	1,260,650,000
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	63 Unit	1,260,650,000
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi		856,000,000
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		404,650,000

Sumber: POK Revisi 18 TA 2023

Dalam mewujudkan target kinerja BPKHTL Wilayah XIV Kupang maka dibuat sebuah komitmen berupa Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja BPKHTL Wilayah XIV Kupang selaku penerima amanah dan kesepakatan, akan mempertanggungjawabkan penugasan itu kepada Ditjen PKTL selaku pemberi amanah dan kesepakatan. Perjanjian Kinerja antara Ditjen PKTL (pemberi amanah dan kesepakatan) dengan BPKHTL Wilayah XIV Kupang (penerima amanah dan kesepakatan) Tahun 2023 adalah sebagaimana pada lampiran. Di level satker, Perjanjian Kinerja pun dibuat antara Kepala Balai dengan Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Sebagaimana terlampir.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja 2023 (Perubahan II) BPKHTL Wilayah XIV Kupang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN II)					
SATUAN KERJA : 439661. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XIV KUPANG					
NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan				
1.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
2.	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Dokumen
3.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
II.	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan				
1.	Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	3	3	Klaster
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Layanan
III.	Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan				
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	-	-	Unit
IV.	Terselesainya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap				
1.	Terselesainya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	1.139	1.139	Km

V.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA				
1.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	-	-	Provinsi
VI.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK				
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82	82	Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Perubahan II

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program sebagai *Outcomes* program BPKHTL Wilayah XIV Kupang Tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) BPKHTL Wilayah XIV Kupang Tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPKHTL Wilayah XIV Kupang terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian IKK BPKHTL Wilayah XIV Kupang

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023			Efisiensi
	Target	Realisasi	%	
Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 layanan	100	1
Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 layanan	100	1
Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100	1
Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	1.139 Km	1.782,21 Km	156,47	1,56
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	3 Klaster	3 Klaster	100	1

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2023			Efisiensi
	Target	Realisasi	%	
Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100	1
Indikator Kinerja Kegiatan 8 (Nilai SAKIP Ditjen PKTL)	82 Poin	79,29 poin	96,70 poin	0,967
Nilai Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level 3	Level 3	100	1

Untuk setiap capaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya sebagai berikut:

A. IKK 1 Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, BPKHTL Wilayah XIV Kupang diamanatkan untuk menyelesaikan layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor dengan target 1 Layanan, dan telah direalisasikan sebanyak 1 Layanan atau mencapai 100%.

Tabel 6. Capaian Kinerja Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja 2023			% Capaian terhadap Renstra 2020-2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	3 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100	33,33
Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	3 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100	33,33

Kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor dilaksanakan dalam rangka fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tata lingkungan di daerah, dan memperkuat instrumen tata lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penyelenggaraan RPPLH

dan KLHS, dengan mengintegrasikan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, termasuk sinkronisasi data dan informasi serta dokumen lingkungan yang telah diterbitkan.

Pada Tabel 6, memperlihatkan capaian indikator kinerja kegiatan layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL terealisasi sebanyak 1 Layanan menyumbang 33,33% terhadap target Renstra 2020-2024 dengan komponen kegiatan fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.

Kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor mulai dilaksanakan Tahun 2022 melalui kegiatan diseminasi tata lingkungan di daerah lingkup Provinsi NTT. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target Renstra disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Capaian Kinerja				Kumulatif Capaian Kinerja (s.d. 2023)	Target Renstra 2020-2024	% Capaian terhadap Renstra 2020-2024
	2020	2021	2022	2023			
Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	-	-	1 Layanan	1 Layanan	2 Layanan	3 Layanan	66,67
Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	-	-	1 Layanan	1 Layanan	2 Layanan	3 Layanan	66,67

Tabel 7 memperlihatkan capaian IKK layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL secara kumulatif sampai dengan Tahun 2023 telah terealisasi 2 Layanan atau telah mencapai 66,67% dari target Renstra 2020-2024. Kegiatan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mengkoordinasikan kegiatan lingkungan hidup dalam rangka pengendalian dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada Tahun 2023, BPKHTL menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan mengundang tenaga ahli dalam penyusunan KLHS serta melibatkan UPT KLHK dan DLHK Provinsi NTT sebagai peserta.

Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Penyusunan Dokumen KLHS



Gambar 4. Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Penyusunan Dokumen KLHS

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2020-2024 dilakukan untuk mengetahui capaian tahun keempat Renstra yang digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mencermati perkiraan capaian pada akhir Tahun 2024. Tabel 7 menunjukkan capaian kinerja kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor pada Tahun 2023 sebagai tahun keempat, yang dipersentasekan dengan volume total yang akan dicapai pada akhir Renstra Tahun 2024. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi tata lingkungan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan yang dapat

dihasilkan oleh kebijakan yang diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Harapannya, melalui kegiatan koordinasi dengan instansi yang membidangi lingkungan hidup di daerah, dapat meningkatkan peran BPKHTL di tingkat tapak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran kinerja kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor Tahun 2023 yang dilaksanakan harus mampu menyumbang keberhasilan pencapaian target Ditjen PKTL sebagai pencapaian Nasional. Tabel 8 memperlihatkan capaian kinerja kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah XIV Kupang terhadap realisasi Nasional Tahun 2023.

Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2023 terhadap Realisasi Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Capaian Kinerja 2023			Realisasi Nasional Tahun 2023	% Capaian terhadap Realisasi Nasional
	Target	Realisasi	% Capaian		
Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100	22 Layanan	4,54
Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1 Layanan	1 Layanan	100	22 Layanan	4,54

Tabel 8 menunjukkan persentase capaian kinerja kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor oleh BPKHTL Wilayah XIV Kupang Tahun 2023 terhadap realisasi Nasional. Angka dalam tabel itu menunjukkan bahwa dengan realisasi 1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, BPKHTL Wilayah XIV Kupang telah menyumbang kinerja sebesar 4,54% terhadap realisasi Nasional. Kajian-kajian lingkungan hidup diharapkan dapat mendukung Kebijakan, Rencana, dan Program di Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun kabupaten/kota yang terintegrasi dengan program Prioritas Nasional.

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran kinerja ini sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sampai dengan akhir Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp.49.999.810,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus

sepuluh rupiah) atau mencapai 100%. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja yang mencapai 100%, maka BPKHTL Wilayah XIV Kupang telah efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran pada komponen ini sebesar 1,0%.

B. IKK 2 *Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL*

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Perubahan I, BPKHTL Wilayah XIV Kupang diamanatkan untuk menyelesaikan sasaran kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan terkait pelepasan kawasan hutan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria). Indikator kinerja dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL dengan target 1 Provinsi, yang memiliki 1 (satu) komponen kegiatan yaitu (1) Dukungan pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan. Dukungan pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan yang dilaksanakan Tahun 2023 meliputi koordinasi penyelesaian TORA dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Biru TORA dalam rangka pelepasan kawasan hutan untuk TORA kepada masyarakat perwakilan dari 3 (tiga) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas kawasan hutan yang dilepaskan seluas 1.075 Ha.

Tabel 9. Capaian Kinerja Dukungan Pelaksanaan Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja 2023			% Capaian terhadap Renstra 2020-2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	3 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100	33
Dukungan pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	3 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100	33

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2023, penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan dengan realisasi penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA sepanjang 2.180,36 Km seperti terlihat pada tabel 10.

Tabel 10. Realisasi SK Biru TORA di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023

No	Kabupaten/Kota	Nomor Surat Keputusan TORA	Tanggal	Luas (ha)
1	Manggarai Barat	SK.153/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	11 Maret 2020	281,143
2	Menggarai Timur	SK.345/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	28 Agustus 2020	494,97
3	Lembata	SK.346/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	28 Agustus 2020	159,76
4	Ngada	SK.347/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	28 Agustus 2020	16,183
5	Malaka	SK.348/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	28 Agustus 2020	23,445
6	Sumba Timur	SK.349/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	28 Agustus 2020	128,26
7	Sumba Barat Daya	SK.1.363/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31 Desember 2021	571,723
8	Belu	SK.1.364/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31 Desember 2021	277,7
9	Timor Tengah Utara	SK.1.365/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31 Desember 2021	227,181
Jumlah SK Biru Tora Tahun 2020-2023				2.180,365

Pada Tabel 11 memperlihatkan indikator kinerja kegiatan dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL telah menyumbang sebesar 66,66% terhadap target Renstra 2020-2024, dan komponen kegiatan dukungan pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan telah menyumbang sebesar 66,66% terhadap target Renstra 2020-2024.

Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Capaian Kinerja				Kumulatif Capaian Kinerja (s.d. 2023)	Target Renstra 2020-2024	% Capaian terhadap Renstra 2020-2024
	2020	2021	2022	2023			
Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	66,66
Dukungan pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	66,66

Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA Tahun 2023 terhadap Renstra 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Capaian Kinerja 2023			Target Renstra 2020-2024	% Capaian terhadap Renstra 2020-2024
		Target	Realisasi	% Capaian		
Terselesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Provinsi (3 Kab/Kota)	1 Provinsi (3 Kab/Kota)	100	1 Provinsi (22 Kab/Kota)	13,63
	Dukungan pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kegiatan	1 Rekomendasi Kegiatan	100	3 Rekomendasi Kebijakan	66,66

Pada Tabel 12, memperlihatkan capaian indikator kinerja kegiatan penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA Tahun 2023 BPKHTL Wilayah XIV Kupang menyumbang sebanyak 13,63% terhadap target Renstra 2020-2024 dengan komponen kegiatan dukungan pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan dan menyumbang sebanyak 66,66% terhadap target Renstra 2020-2024.

Dukungan sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran kegiatan adalah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta

rupiah), dan sampai dengan akhir Tahun 2023 penggunaan anggaran mencapai Rp.74.999.800,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atau mencapai 100%. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja yang mencapai 100%, maka BPKHTL Wilayah XIV Kupang telah efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran pada komponen kegiatan ini sebesar 1,0%

C. IKK 3 Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL

Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan Tahun 2023 ditargetkan 1 Layanan, dan telah direalisasikan 1 Layanan atau 100% dari target.

Tabel 13. Capaian Kinerja Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja 2023			% Capaian terhadap Renstra 2020-2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	2 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100	50
Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	2 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100	50

Kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan melalui koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi serta dokumen lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan kajian dampak lingkungan bidang usaha dan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tata lingkungan di daerah dan memperkuat instrumen tata lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kajian tata lingkungan bidang usaha dan kegiatan mulai dilaksanakan Tahun 2023 sesuai tugas dan fungsi BPKHTL dalam Peraturan Menteri LHK

Nomor 18 tahun 2022. Tabel 14 menunjukkan pelaksanaan kinerja kajian tata lingkungan bidang usaha dan kegiatan dalam tahun Renstra 2020-2024.

Tabel 14. Capaian Kinerja Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Capaian Kinerja				Kumulatif Capaian Kinerja (s.d. 2023)	Target Renstra 2020-2024	% Capaian terhadap Renstra 2020-2024
	2020	2021	2022	2023			
Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	-	-	-	1 Layanan	1 Layanan	2 Layanan	50
Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	-	-	-	1 Layanan	1 Layanan	2 Layanan	50

Tabel 14 memperlihatkan capaian IKK layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL terealisasi 1 Layanan di Tahun 2023. Kegiatan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mengkoordinasikan kegiatan lingkungan hidup dalam rangka pengendalian dampak lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain koordinasi, BPKHTL Wilayah XIV Kupang menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Dokumen Lingkungan dengan melibatkan Penyusun dan Penilai AMDAL lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Gambar 5. Bimtek Penggambaran dan Penyajian Peta Dokumen Lingkungan

Capaian kinerja kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan pada Tahun 2023 sebagai tahun keempat Renstra 2020-2024, yang dipersentasekan dengan volume total yang akan dicapai pada akhir Renstra Tahun 2024. Pada Tabel 14, memperlihatkan capaian indikator kinerja kegiatan layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL dengan realisasi 1 Layanan atau mencapai 50% dari target Renstra 2020-2024 dengan komponen kegiatan fasilitasi kajian dampak lingkungan bidang usaha dan kegiatan. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi bidang pengendalian dampak lingkungan usaha dan kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sasaran kinerja kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan Tahun 2023 yang dilaksanakan turut menyumbang keberhasilan pencapaian target Ditjen PKTL sebagai pencapaian Nasional. Tabel 15 memperlihatkan capaian kinerja kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah XIV Kupang terhadap realisasi Nasional Tahun 2023.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan Tahun 2023 terhadap Realisasi Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Capaian Kinerja 2023			Realisasi Nasional Tahun 2023	% Capaian terhadap Realisasi Nasional
	Target	Realisasi	% Capaian		
Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100	22 Layanan	4,54
Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1 Layanan	1 Layanan	100	22 Layanan	4,54

Tabel 15 menunjukkan bahwa dengan realisasi 1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan, BPKHTL Wilayah XIV Kupang telah menyumbang kinerja sebesar 4,54% terhadap realisasi Nasional. Kegiatan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan Tahun 2023 yang direncanakan untuk mendukung sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat tercapai 100% dari targetnya. Faktor penunjang keberhasilan capaian kinerja ini adalah koordinasi yang intens dengan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, koordinasi dengan instansi yang membidangi lingkungan hidup di daerah, dan perencanaan kegiatan yang baik. Pencapaian target kinerja kegiatan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan Tahun 2023 akan menunjang capaian program planologi kehutanan dan tata lingkungan pada kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan.

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran kinerja ini sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sampai dengan akhir Tahun 2023 penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp.49.999.705,- (Empat Puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima rupiah) atau mencapai 100%. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja yang mencapai 100%, maka BPKHTL Wilayah XIV Kupang telah efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran pada komponen ini sebesar 1,0%.

D. IKK 4 *Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga*

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, indikator kinerja kegiatan panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga (termasuk kawasan konservasi perairan) ditargetkan sepanjang 1.139 Km. BPKHTL Wilayah XIV telah menyelesaikan penataan batas kawasan hutan di wilayah Nusa Tenggara Timur sepanjang 1.782,21 Km atau mencapai 156,47%, dengan rincian penataan batas kawasan hutan (dataran) sepanjang 1.375,27 Km dan penataan batas kawasan hutan (kawasan konservasi perairan) sepanjang 406,94 Km.

Tabel 16. Capaian Kinerja Penataan Batas Kawasan Hutan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja 2023			% Capaian terhadap Renstra 2020-2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	2.566 Km	1.139 Km	1.782,21 Km	156,47	0,03
Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan (reguler)	2.566 Km	1.139 Km	1.782,21 Km	156,47	0,03

Tahun 2023 adalah tahun keempat pelaksanaan Renstra 2020-2024. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, BPKHTL Wilayah XIV Kupang telah melaksanakan penataan batas kawasan hutan termasuk kawasan konservasi perairan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 17. Perbandingan Capaian Kinerja Penataan Batas Kawasan Hutan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Capaian Kinerja				Kumulatif Capaian Kinerja (s.d. 2023)	Target Renstra 2020-2024	% Capaian terhadap Renstra 2020-2024
	2020	2021	2022	2023			
Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	-	1.427 Km	-	1.782,21 Km	3.209,21	2.566	69,45
Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	-	1.427 Km	-	1.782,21 Km	3.209,21	2.566	69,45

Tabel 17 menunjukkan perbandingan capaian kinerja penataan batas kawasan hutan (regular termasuk kawasan konservasi) Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan BPKHTL Wilayah XIV Kupang.

Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja Penataan Batas Kawasan Hutan Tahun 2023 terhadap Realisasi Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Capaian Kinerja 2023			Realisasi Nasional Tahun 2023	% Capaian terhadap Realisasi Nasional
	Target	Realisasi	% Capaian		
Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	1.139 Km	1.782,21 Km	156,47	38.621,01 Km	4,61
Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan (reguler)	1.139 Km	1.782,21 Km	156,47	4.540,04 Km	39,25

Tabel 18 menunjukkan persentase capaian kinerja penataan batas kawasan hutan oleh BPKHTL Wilayah XIV Kupang Tahun 2023 terhadap realisasi Nasional dengan menyumbang kinerja penataan batas kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi perairan) sebesar 39,25% terhadap realisasi Nasional untuk penataan batas kawasan yang dilaksanakan secara virtual, dan secara keseluruhan telah menyumbang kinerja penataan batas kawasan hutan sebesar 4,61% terhadap realisasi Nasional. Capaian kinerja penataan batas kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi perairan) ini adalah salah satu

rangkaian upaya percepatan penyelesaian pengukuhan kawasan hutan yang masuk dalam Program Strategis Nasional dalam kelompok Program Pemerataan Ekonomi, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. terdapat beberapa kawasan hutan yang belum tuntas proses penataan batasnya dikarenakan penolakan dari masyarakat. alternatif penyelesaian permasalahan tersebut diantaranya adalah menyarankan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk dilakukan review Tata Ruang.

Pada Tahun 2023, pelaksanaan Tata Batas Reguler dilaksanakan di 12 Kabupaten sedangkan, tata batas kawasan konservasi perairan dilaksanakan di 3 Kabupaten dan Kota. Adapun lokasi penataan batas baik reguler maupun kawasan konservasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 19. Lokasi Penataan Batas Tahun 2023 lingkup Provinsi NTT

SATKER	Kabupaten / Kelompok Hutan	REALISASI (Km)				Potensi Luas Penetapan KH (Ha)
		BL	TB DEF BF AKTUAL	TB DEF BF VIRTUAL	TOTAL TB DEF	
		TB DEF Virtual				
BPKHTL WILAYAH XIV KUPANG		225,17	-	-	1.777,34	192.400,51
1	Timor Tengah Utara	13,10			64,64	12.265,38
2	Timor Tengah Selatan	178,38			298,31	41.492,52
3	Sumba Timur	2,59			463,35	
4	Alor				66,11	
5	Flores Timur				96,96	
6	Kupang	20,64			196,22	
7	Malaka	5,44			10,07	
8	Manggarai Barat				7,33	
9	Sumba Barat Daya				1,04	
10	Sumba Tengah				22,06	
11	Manggarai Timur				44,62	
12	Belu	5,02			99,69	
13	Kota/Kabupaten Kupang (Perairan)				193,10	59.328,02
14	Ngada (Perairan)				42,17	7.303,01
15	Sikka (Perairan)				171,67	72.011,58

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran kinerja ini sebesar Rp.14.226.631.000,- (empat belas miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dan sampai dengan akhir Tahun 2023 penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp.14.221.198.300,- (empat belas miliar dua ratus dua puluh satu seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) atau mencapai 99,96%. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja yang mencapai 100%, maka efisiensi BPKHTL Wilayah XIV Kupang dalam menggunakan sumber daya anggaran pada komponen ini sebesar 0,9%.

E. IKK 5 *Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH*

Inventarisasi potensi sumber daya hutan dilaksanakan melalui kegiatan Enumerasi PSP hutan lahan kering untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi hutan seperti jumlah pohon, tingkat semai (seedling), sapihan (sapling), tiang (poles) dan pohon (trees), kematian pohon dan tingkat kerusakannya, distribusi jenis seperti bambu, rotan dan hasil hutan non kayu, serta kondisi lahan lainnya seperti kelerengan, slope, aspek, terain dan lainnya dengan target sebanyak 3 (tiga) klaster, dan terealisasi sebanyak 3 (tiga) klaster atau mencapai 100% dari targetnya, dengan rincian yaitu :

- a. Enumerasi TSP/PSP hutan lahan kering pada Grid Klaster 51.335.9040 di Kelompok Hutan Kemang Boleng Kabupaten Ende;
- b. Enumerasi TSP/PSP hutan lahan kering pada Grid Klaster 51.340.9040 di Kelompok Hutan Kemang Boleng Kabupaten Ende.
- c. Enumerasi TSP/PSP hutan lahan kering pada Grid Klaster 51.700.8985 di Kelompok Hutan Bifeminasi Sonmahole Kabupaten Belu.

Tabel 20. Capaian Kinerja Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja 2023			% Capaian terhadap Renstra 2020-2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	35 Klaster	3 Klaster	3 Klaster	100	8,57
Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan	35 Klaster	3 Klaster	3 Klaster	100	8,57

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2020-2024 dilakukan untuk mengetahui capaian tahun keempat Renstra yang digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mencermati perkiraan capaian pada akhir Tahun 2024. Tabel 20 menunjukkan capaian target dan realisasi inventarisasi potensi sumber daya hutan pada Tahun 2023 sebagai tahun keempat, kemudian dipersentasekan dengan volume total yang akan dicapai pada target akhir Renstra Tahun 2024. Pada Tabel 20 memperlihatkan capaian indikator kinerja kegiatan data dan informasi sumber daya hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL sebanyak 3 Klaster dapat menyumbang sebesar 8,57% terhadap target Renstra 2020-2024 melalui komponen kegiatan inventarisasi potensi sumber daya hutan (Enumerasi PSP/TSP).

BPKHTL Wilayah XIV Kupang telah melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya hutan Tahun 2020 hingga Tahun 2023 melalui kegiatan Enumerasi TSP/PSP pada 25 klaster di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tabel 21 menunjukkan perbandingan capaian kinerja hasil inventarisasi potensi sumber daya hutan Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan BPKHTL Wilayah XIV Kupang.

Tabel 21. Perbandingan Capaian Kinerja Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Capaian Kinerja				Kumulatif Capaian Kinerja (s.d. 2023)	Target Renstra 2020-2024	% Capaian terhadap Renstra 2020-2024
	2020	2021	2022	2023			
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	10 Klaster	4 Klaster	8 Klaster	3 Klaster	25 Klaster	35 Klaster	71,42
Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan	10 Klaster	4 Klaster	8 Klaster	3 Klaster	25 Klaster	35 Klaster	71,42

Tabel 21 memperlihatkan capaian IKK data dan informasi sumber daya hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL secara kumulatif sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 telah mencapai 25 Klaster melalui Enumerasi TSP/PSP. Capaian tersebut telah mencapai 71,42% dari target Renstra 2020-2024.

Sasaran kegiatan inventarisasi potensi sumber daya hutan Tahun 2023 yang dilaksanakan harus mampu menyumbang keberhasilan pencapaian target Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 sebagai pencapaian Nasional. Tabel 22 memperlihatkan capaian BPKHTL Wilayah XIV Kupang dalam inventarisasi potensi sumber daya hutan Tahun 2023 terhadap realisasi Nasional Tahun 2023.

Tabel 22. Perbandingan Capaian Kinerja Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan Tahun 2023 terhadap Realisasi Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Capaian Kinerja 2023			Target Realisasi Nasional Tahun 2023	% Capaian terhadap Realisasi Nasional
	Target	Realisasi	% Capaian		
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	3 Klaster	3 Klaster	100	72 Klaster	4,16
Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan	3 Klaster	3 Klaster	100	72 Klaster	4,16

Tabel 22 menunjukkan persentase capaian kinerja inventarisasi potensi sumber daya hutan oleh BPKHTL Wilayah XIV Kupang Tahun 2023 terhadap realisasi Nasional. Angka dalam tabel itu menunjukkan bahwa BPKHTL Wilayah XIV Kupang telah menyumbang kinerja inventarisasi potensi sumber daya hutan sebesar 4,16% terhadap realisasi Nasional. Inventarisasi potensi sumber daya hutan melalui kegiatan Enumerasi PSP adalah kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah XIV Kupang untuk mengetahui potensi sumber daya hutan. Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi potensi sumber daya hutan digunakan sebagai bahan perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan, dan bahan perumusan kebijakan strategis jangka panjang, jangka menengah dan operasional jangka pendek agar diperoleh kelestarian hutan.

Secara umum, kegiatan inventarisasi potensi sumber daya hutan yang direncanakan untuk mendukung sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan dapat terlaksana dengan baik, sehingga realisasi dapat tercapai 100% sesuai target. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh perencanaan kegiatan yang baik, sumberdaya manusia yang berpengalaman dan peralatan inventarisasi yang memadai.

Dukungan sumber daya anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan inventarisasi potensi sumber daya hutan Tahun 2023 turut menentukan keberhasilan capaian sasaran ini. Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran kinerja ini sebesar Rp.221.662.000,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), dan sampai dengan akhir Tahun 2023 penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp.221.661.190,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah) atau mencapai 100%. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja yang mencapai 100%, maka BPKHTL Wilayah XIV Kupang telah efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran pada komponen ini sebesar 1,0%.

F. IKK 6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH

Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat Nasional Tahun 2023 terealisasi 1 Laporan atau 100% dari targetnya. Pengecekan lapangan (groundcheck) hasil penafsiran citra resolusi sedang telah dilaksanakan di 1 (satu) lokasi yaitu di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Gambar 6. Pengecekan Lapangan (Groundcheck)

Kegiatan pengecekan lapangan bertujuan untuk memperbaiki data hasil penafsiran yang diduga meragukan kelas penutupan lahannya. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, dari 35 (tiga puluh lima) titik sampel pengecekan lapangan terdapat 6 (enam) titik sampel yang tidak sesuai antara hasil penafsiran citra satelit dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Data hasil pengecekan lapangan dipergunakan untuk memperbaiki data kelas penutupan lahan yang dihasilkan dari kegiatan penafsiran citra resolusi sedang.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra 2020-2024 dilakukan untuk mengetahui capaian tahun keempat Renstra yang digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mencermati perkiraan capaian pada akhir Tahun 2024. Tabel 23 menunjukkan capaian target dan realisasi pelaksanaan penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat Nasional Tahun 2023, kemudian dipersentasekan dengan volume total yang akan dicapai pada target akhir Renstra Tahun 2024.

Tabel 23. Capaian Kinerja Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja 2023			% Capaian terhadap Renstra 2020-2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	20
Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	20

Pada Tabel 23 memperlihatkan capaian indikator kinerja kegiatan data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL sebanyak 1 Laporan dapat menyumbang sebesar 20% terhadap target Renstra 2020-2024 melalui komponen kegiatan penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat Nasional.

Tabel 24. Perbandingan Capaian Kinerja Pelaksanaan Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Capaian Kinerja				Kumulatif Capaian Kinerja (s.d. 2023)	Target Renstra 2020-2024	% Capaian terhadap Renstra 2020-2024
	2020	2021	2022	2023			
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1	1	1	1	4	5	80
Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	1	1	1	1	4	5	80

Tabel 24 memperlihatkan capaian IKK data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL secara kumulatif sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 telah mencapai 4 (empat) Laporan yang

dilaksanakan di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Capaian tersebut telah mencapai 80% dari target Renstra 2020-2024.

Sasaran kegiatan penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat Nasional Tahun 2023 yang dilaksanakan harus mampu menyumbang keberhasilan pencapaian target Nasional dalam hal ketersediaan dan pemutakhiran data dan informasi sumber daya hutan. Tabel 25 memperlihatkan sumbangsih BPKHTL Wilayah XIV Kupang dalam mendukung ketersediaan dan pemutakhiran data dan informasi sumber daya hutan terhadap realisasi Nasional Tahun 2023.

Tabel 25. Perbandingan Capaian Kinerja Pelaksanaan Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional Tahun 2023 terhadap Realisasi Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Capaian Kinerja 2023			Target Realisasi Nasional Tahun 2023	% Capaian terhadap Realisasi Nasional
	Target	Realisasi	% Capaian		
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1 Laporan	1 Laporan	100	22 Laporan	4,54
Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	1 Laporan	1 Laporan	100	22 Laporan	4,54

Tabel 25 menunjukkan persentase capaian kinerja kegiatan penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat Nasional oleh BPKHTL Wilayah XIV Kupang Tahun 2023 terhadap realisasi Nasional. Angka dalam tabel itu menunjukkan bahwa BPKHTL Wilayah XIV Kupang telah menyumbang kinerja untuk mencapai sasaran ketersediaan dan pemutakhiran data dan informasi sumber daya hutan sebesar 4,54% terhadap realisasi Nasional.

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran kinerja ini sebesar Rp.107.342.000,- (seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan sampai dengan akhir Tahun 2023 penggunaan anggaran tersebut

mencapai Rp.107.305.900,- (seratus tujuh juta tiga ratus lima ribu Sembilan ratus rupiah) atau mencapai 99,97%. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja yang mencapai 100%, maka BPKHTL Wilayah XXII telah efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran pada komponen ini sebesar 0,9%.

G. IKK 7 Indikator Kinerja Kegiatan 8 (Nilai SAKIP Ditjen PKTL)

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PKTL dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi. Indikator meningkatnya tata kelola pemerintahan ditandai dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen PKTL, serta laporan keuangan yang akuntabel. BPKHTL Wilayah XXII mendukung tercapainya target nilai SAKIP dan nilai maturitas SPIP Ditjen PKTL. Capaian indikator kinerja kegiatan nilai SAKIP Ditjen PKTL, level maturitas SPIP Ditjen PKTL, dan laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel Tahun 2023 disajikan pada Tabel 26.

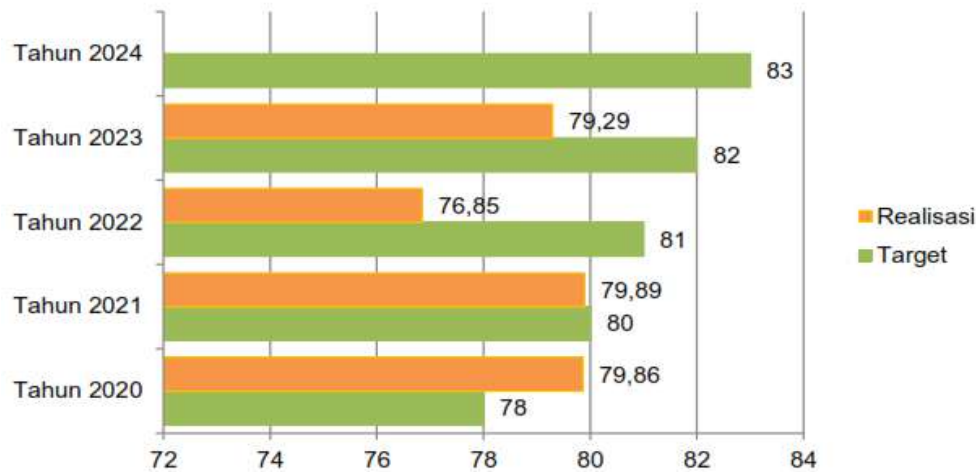
Tabel 26. Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja 2023			% Capaian Terhadap Remstra 2020-2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Nilai SAKIP Ditjen PKTL	83 Poin	82 Poin	79,29 Poin	96,70	95,53
Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level 4	Level 3	Level 3	100	75,00
Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	20,00
Layanan umum	5 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100	20,00
Layanan perkantoran	5 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100	20,00
Layanan sarana internal :					
- Pengadaan perangkat pengolah data dan informasi	109 Unit	27 Unit	27 Unit	100	24,77
- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	67 Unit	36 Unit	36 Unit	100	53,73

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam sasaran kinerja Tahun 2023, ditargetkan nilai SAKIP Ditjen PKTL 82 poin, dan berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas implementasi SAKIP Ditjen PKTL Tahun 2022 yang dilakukan pada Tahun 2023, Ditjen PKTL memperoleh nilai 79,29 dengan predikat BB (Sangat Baik). Predikat tersebut berarti bahwa kinerja Ditjen PKTL sangat baik ditandai dengan sudah mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Bila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2022, capaian nilai SAKIP Ditjen PKTL Tahun 2023 meningkat sebesar 3,18% yaitu 76,85 poin (Tahun 2022) meningkat menjadi 79,29 poin (Tahun 2023). Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 yang ditargetkan 83 poin, maka capaian nilai SAKIP pada tahun keempat Renstra mencapai 95,53%. Perkembangan nilai implementasi SAKIP disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Perkembangan Nilai Implementasi SAKIP Ditjen PKTL

H. IKK 8 Nilai Maturitas SPIP Ditjen PKTL

Pengukuran Maturitas SPIP dilakukan menggunakan level 1-5, nilai level yang semakin tinggi menunjukkan tingkat kematangan SPIP yang berarti penyelenggaraan SPIP telah diimplementasikan dengan baik dan memadai. Penyelenggaraan SPIP yang baik dan memadai minimal telah mencapai level 3. Dalam sasaran kinerja Tahun 2023, ditargetkan nilai Maturitas SPIP Ditjen PKTL Level 3. Berdasarkan hasil penilaian penjamin kualitas Maturitas SPIP oleh Tim Inspektorat Wilayah 2, BPKHTL Wilayah XIV Kupang memperoleh nilai SPIP 3,67/Level 3 (Terdefinisi), yang berarti bahwa BPKHTL Wilayah XXII selaku UPT Ditjen PKTL telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Tabel 27. Hasil Penilaian Maturitas SPIP BPKHTL Wilayah XIV Kupang Tahun 2023 pada Aplikasi SPIP-Maturitas

No	Tahun	Unit Auditi	Anggota	Ketua	Dainis	Posisi	Status	Penilaian	Hasil PM			Hasil PK	
									SPIP	MRI	IEPK	SPIP	MRI
1	2023	BPKH Wilayah XIV Kupang	Juliati, S.Sos.	Eru Feriana, S.Hut.	Indra Saputra, S.Hut.,M.Si.	SATKER	SELESAI	920/920	3.5892	3.5856	2.734	3.5373	3.4996



Gambar 8. Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPKHTL Wilayah XIV Kupang Tahun 2023 oleh Itjen Wilayah 2

Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, penilaian maturitas SPIP BPKHTL Wilayah XIV Kupang belum diimplementasikan, penilaian maturitas SPIP dilaksanakan pada tingkat Kementerian LHK oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dimana Ditjen PKTL menjadi salah satu unit Eselon I yang menjadi auditan, dengan hasil penilaian maturitas SPIP adalah 3,50 (level 3). Bila dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024, maka realisasi nilai maturitas SPIP tahun keempat Renstra telah mencapai 75%.

Sejalan dengan pelaksanaan pengendalian intern, BPKHTL Wilayah XIV Kupang melakukan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan yang memadai menjadi salah satu komponen penting dalam SPIP maupun SAKIP.

3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data pada aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id>, realisasi penyerapan DIPA Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV TA 2023 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 23.187.682.977,- atau mencapai 99,63% dari total pagu sebesar Rp 23.273.242.000,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 3.516.964.475,-, belanja barang sebesar Rp 18.410.069.302,- dan belanja modal sebesar Rp 1.260.649.200,-. Sedangkan realisasi belanja per sumber dana adalah Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 7,481,720,726,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 15,705,962,251,-.

Tabel 28. Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	439661 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XIV KUPANG	PAGU	3,522,069,000	18,490,523,000	1,260,650,000	0	0	0	0	0	0	23,273,242,000
		REALISASI	3,516,964,475 (99.86%)	18,410,069,302 (99.56%)	1,260,649,200 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23,187,682,977 (99.63%)
		SISA	5,104,525	80,453,698	800	0	0	0	0	0	0	85,559,023
GRAND TOTAL		PAGU	3,522,069,000	18,490,523,000	1,260,650,000	0	0	0	0	0	0	23,273,242,000
		REALISASI	3,516,964,475 (99.86%)	18,410,069,302 (99.56%)	1,260,649,200 (100.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	23,187,682,977 (99.63%)
		SISA	5,104,525	80,453,698	800	0	0	0	0	0	0	85,559,023

Sumber : <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Tabel 29. Realisasi Belanja Per Sumber Dana

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	3,522,069,000	3,966,623,000	0	0	0	0	0	0	0	7,488,692,000
		REALISASI	3,516,964,475 (99.86%)	3,964,756,251 (99.95%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7,481,720,726 (99.91%)
		SISA	5,104,525	1,866,749	0	0	0	0	0	0	0	6,971,274
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU	0	14,523,900,000	1,260,650,000	0	0	0	0	0	0	15,784,550,000
		REALISASI	0.00%	14,445,313,051 (99.46%)	1,260,649,200 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15,705,962,251 (99.50%)
		SISA	0	78,586,949	800	0	0	0	0	0	0	78,587,749
GRAND TOTAL		PAGU	3,522,069,000	18,490,523,000	1,260,650,000	0	0	0	0	0	0	23,273,242,000
		REALISASI	3,516,964,475 (99.86%)	18,410,069,302 (99.56%)	1,260,649,200 (100.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	23,187,682,977 (99.63%)
		SISA	5,104,525	80,453,698	800	0	0	0	0	0	0	85,559,023

Sumber : <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV melaksanakan 4 kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian realisasi

anggaran pada 4 kegiatan tersebut per tanggal 30 Desember Tahun 2023 terlihat pada Tabel 24.

Tabel 30. Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	5432 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	PAGU	3,522,069,000	2,879,888,000	1,260,650,000	0	0	0	0	0	0	7,662,607,000
		REALISASI	3,516,964,475 (99.86%)	2,879,611,815 (99.99%)	1,260,649,200 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7,657,225,490 (99.93%)
		SISA	5,104,525	276,185	800	0	0	0	0	0	0	5,381,510
2	5433 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PAGU	0	14,301,631,000	0	0	0	0	0	0	0	14,301,631,000
		REALISASI	0.00%	14,222,295,300 (99.45%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14,222,295,300 (99.45%)
		SISA	0	79,335,700	0	0	0	0	0	0	0	79,335,700
3	5434 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	PAGU	0	329,004,000	0	0	0	0	0	0	0	329,004,000
		REALISASI	0.00%	328,164,430 (99.74%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	328,164,430 (99.74%)
		SISA	0	839,570	0	0	0	0	0	0	0	839,570
4	5436 Pencegahan Dampak Lingkungan	PAGU	0	980,000,000	0	0	0	0	0	0	0	980,000,000
		REALISASI	0.00%	979,997,757 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	979,997,757 (100.00%)
		SISA	0	2,243	0	0	0	0	0	0	0	2,243
GRAND TOTAL		PAGU	3,522,069,000	18,490,523,000	1,260,650,000	0	0	0	0	0	0	23,273,242,000
		REALISASI	3,516,964,475 (99.86%)	18,410,069,302 (99.56%)	1,260,649,200 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23,187,682,977 (99.63%)
		SISA	5,104,525	80,453,698	800	0	0	0	0	0	0	85,559,023

Sumber : <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada prinsipnya, penilaian IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran satu tahun anggaran penuh. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran diketahui capaian nilai IKPA BPKHTL Wilayah XIV sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 sudah optimal dimana bisa dilihat pada Capaian Output memiliki nilai 100 dengan Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) memiliki nilai 92,79.

Tabel 31. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan Desember 2023

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	039	029	439661	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XIV KUPANG	Nilai	100.00	64.43	83.51	100.00	100.00	96.47	100.00	100.00	92.79	100%	92.79
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.44	16.70	10.00	10.00	9.65	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	82.22		96.00					100.00			

Sumber : <https://spanint.kemenkeu.go.id>

BAB IV

PENUTUP

Secara umum pencapaian sasaran kegiatan pada masing-masing seksi/Kasubag TU pada BPKHTL Wilayah XIV mendukung program dan kegiatan bidang Keplanologian dan Tata Lingkungan. Hal ini dapat dilihat pada kisaran presentase pencapaian rencana tingkat capaian kegiatan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, hasil pencapaian baik dari realisasi fisik maupun realisasi anggaran dalam DIPA BPKHTL Wilayah XIV Kupang Tahun 2023 memperoleh capaian cukup baik yang secara keseluruhan total realisasi mencapai **Rp. 23.187.682.977,-** (dua puluh tiga milyar seratus delapan puluh tujuh enam ratus delapan puluh dua sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari total pagu **Rp. 23.273.242.000,-** (dua puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau **99,63%** dari total pagu anggaran. Secara fisik presentase kegiatan mencapai **100%.**

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN I)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anwar, S.Hut., M.Si
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2023
Pihak Kedua,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Pihak Pertama,

Anwar, S.Hut., M.Si.
NIP.19750626 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN I)
SATUAN KERJA : 238471. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan				
1.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	0	1	Layanan
2.	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	0	1	Dokumen
3.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	0	1	Layanan
II.	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan				
1.	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	2	3	Klaster
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Layanan
III.	Meningkatnya sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan				
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	0	0	Unit
IV.	Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap				
1.	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	0	1.139	Km
V.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA				

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	0	0	Provinsi
VI.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK				
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82	82	Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan			
5436.QAH	Pelayanan publik lainnya	0	2	layanan
5436.QAH.002	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	0	1	Layanan
5436.QAH.003	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	0	1	Layanan
5436.QMA	Data dan Informasi Publik			
5436.QMA.002	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	0	1	Dokumen
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	1	2	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	0	1	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1	1	Rekomendasi Kebijakan
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	3	4	Layanan
5434.BMA.002	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	2	3	Layanan
5434.BMA.003	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
6744	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
6744.BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	0	0	Badan usaha
6744.BAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	0	0	Badan usaha
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	2	Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	1	1	Layanan
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan
5432.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0	63	Unit

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	0	63	Unit
5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	0	0	Unit

Program/Kegiatan	Anggaran	
	Semula	Menjadi
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
1. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp. 526.631.000,-	Rp. 14.301.631.000,-
2. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 259.004.000,-	Rp. 329.004.000,-
3. Rencana dan Pengawasan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp.-	Rp. -
Program Kualitas Lingkungan Hidup		
4. Pencegahan Dampak Lingkungan	Rp. 980.000.000,-	Rp. 980.000.000,-
Program Dukungan Manajemen		
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp. 6.852.073.000,-	Rp. 8.417.213.000,-
TOTAL ANGGARAN	Rp. 8.617.708.000,-	Rp. 24.027.848.000,-

Jakarta, September 2023

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Kepala BPKHTL Wilayah XIV Kupang



Anwar, S.Hut., M.Si.
NIP. 19750606 200212 1 005



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XIV KUPANG**

KEPUTUSAN
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XIV**
Nomor : SK.24/BPKHTL.XIV/TU/KEU.1/1/2023

TENTANG
PERJANJIAN KINERJA
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XIV KUPANG TAHUN 2023**

KEPALA BALAI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tercapainya kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang Tahun 2023, seluruh pejabat lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang wajib membuat penetapan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang tentang Penetapan Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2015 tentang Kinerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 83/PMK.02/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 199/PMK.02/2021 tentang Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan ;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
16. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor:SK.21./PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023.
17. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.19/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-12/PB/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD);
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024;
21. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan Nomor:SK.21./PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023.
22. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPKH Wilayah XIV Kupang Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-029.06.2.439661/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XIV KUPANG TENTANG PERJANJIAN KINERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XIV KUPANG TAHUN 2023. |
| KESATU | : | Menetapkan Perjanjian Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang Tahun 2023 sebagaimana terlampir. |

- KEDUA : Perjanjian Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang Tahun 2023 merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja BPKHTL Wilayah XIV Kupang sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Perjanjian Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang Tahun 2023 menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja BPKHTL Wilayah XIV Kupang Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atau sampai berakhirnya kegiatan tahun 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Kupang
Pada tanggal : 9 Januari 2023
Kepala Balai,

Anwar, S.Hut, M.Si

NIP. 19750626 200212 1 005 21

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan c.q Kepala Bagian Program Evaluasi Hukum dan Kerjasama Teknik Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
3. Kepala Balai Besar KSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Koordinator UPT

Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan
Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang

Nomor : SK. /BPKHTL.XIV/TU/KEU.1/1/2023
Tanggal : Januari 2023

PERJANJIAN KINERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XIV KUPANG
TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoseph Boseran, SH, M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anwar, S.Hut, M.Si
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV
Kupang
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV

Anwar, S.Hut, M.Si
NIP. 19750626 200212 1 005

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

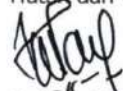
Yoseph Boseran, SH, M.Si
NIP. 19660610 199103 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Satuan Kerja : Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV
Kupang
Sub Bagian / Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Layanan Umum	1. Nilai SAKIP Ditjen PKTL 2. Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL 3. Laporan Keuangan Ditjen PKTL Yang Tertib dan Akuntabel	1 Layanan	Rp. 550.000.000,-
2	Layanan perkantoran	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	1 Layanan	Rp. 6.302.073.000,-
JUMLAH				Rp. 6.852.073.000,-

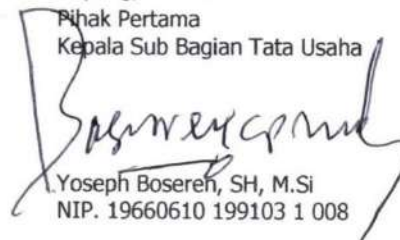
Pihak Kedua
Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang,



Anwar, S.Hut, M.Si
NIP. 19750626 200212 1 005

Kupang, Januari 2023

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Yoseph Bosereh, SH, M.Si
NIP. 19660610 199103 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Melianus Nubatonis, SP, M.Sc
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anwar, S.Hut, M.Si
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV

Anwar, S.Hut, M.Si
NIP. 19750626 200212 1 005

Pihak Pertama
Plt. Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan
Tata Lingkungan

Samuel Melianus Nubatonis, SP, M.Sc
NIP. 19760503 199703 1 003

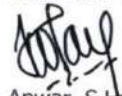
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Satuan Kerja : Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV
Kupang
Sub Bagian / Seksi : Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dokumen RPPLH	Dokumen RPPLH yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp. 980.000.000,-
2	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani	2 Layanan	Rp. 151.662.000,-
3	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun	1 Layanan	Rp. 107.342.000,-
JUMLAH				Rp. 1.239.004.000,-

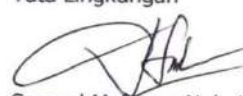
Kupang, Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV



Anwar, S.Hut, M.Si
NIP. 19750626 200212 1 005

Pihak Pertama
Plt. Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan
Tata Lingkungan



Semuel Mellanus Nubatonis, SP, M.Sc
NIP. 19760503 199703 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Melianus Nubatonis, SP, M.Sc
Jabatan : Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anwar, S.Hut, M.Si
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV

Anwar, S.Hut, M.Si
NIP. 19750626 200212 1 005

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pengukuhan dan
Perencanaan Kawasan Hutan

Samuel Melianus Nubatonis, SP, M.Sc
NIP. 19760503 199703 1 003


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Satuan Kerja : Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV
Kupang
Sub Bagian / Seksi : Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan Atas Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan Diterbitkan	1 Rekomendasi Kebijakan	RP. 526.631.000,-

Kupang, Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
dan Tata Lingkungan Wilayah XIV


Anwār, S.Hut, M.Si
NIP. 19750626 200212 1 005

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pengukuhan dan
Perencanaan Kawasan Hutan


Semuel Melianus Nubatonis, SP, M.Sc
NIP. 19760503 199703 1 003